

Laporan Pelaksanaan Kegiatan

PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU



2023



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Tahun 2023 dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih juga diucapkan kepada semua pihak, terutama Tim Penyusun sehingga Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini dapat rampung sesuai dengan waktu yang ditentukan. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kami dalam menjalankan tugas pokok selama tahun 2023. Laporan ini disusun sesuai dengan Sistematika Penulisan Laporan yang ditentukan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui surat nomor 4108/SEK/OT1.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023.

Laporan ini menggambarkan keadaan dan perkembangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau selama Tahun 2023, yaitu keadaan organisasi peradilan secara teknis maupun non teknis, dengan harapan laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan kinerja peradilan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Mengetahui
Ketua Pengadilan Negeri
Lubuklinggau



Yunizar Kilat Daya, SH., M.H.
NIP 197106131996031002

Sekretaris
Pengadilan Negeri Lubuklinggau



Patra Sukma, S.Kom., SH., MH.
NIP 197907092009041002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar/Bagan	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II ADMINISTRASI PERKARA	4
A. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN UMUM	4
B. PENYELESAIAN PERKARA	4
C. CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL	5
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA	6
A. KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA	7
B. MUTASI & PROMOSI	8
C. PENSIUN	9
D. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	9
BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA & PRASARANA SERTA TEKNOLOGI INFORMASI	12
A. PENGELOLAAN KEUANGAN	12
B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA	13
C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI	19
BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	21
A. PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS	21
B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	22
C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK	23
BAB VI PENGAWASAN	26
A. INTERNAL	27
B. EVALUASI	28
BAB VII PENUTUP	30
A. KESIMPULAN	30
B. REKOMENDASI	30

Daftar Gambar

Gambar 4.1	Evaluasi Implementasi SIPP Pengadilan Negeri Kelas 1A.....	20
Gambar 5.1	Piagam Penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK).....	22
Gambar 5.2	Piagam Penghargaan Lomba Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	23
Gambar 5.3	Layanan Antar Jemput Prioritas dan Manula	24
Gambar 5.5	Screen Shoot SITAPURANA	25

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Rekapitulasi Perkara Berdasarkan Klasifikasi Perkara.....	4
Tabel 2.2	Rekapitulasi Penyelesaian Perkara Tahun 2023	5
Tabel 2.3	Realisasi Anggaran Pos Bantuan Hukum	5
Tabel 3.1	Daftar Nama Seluruh Personil Pengadilan Negeri Lubuklinggau	7
Tabel 3.2	Daftar Promosi dan Mutasi Tahun 2023	8
Tabel 3.3	Daftar Pensiun Tahun 2023.....	9
Tabel 3.4	Daftar Pegawai Yang Mengikuti Diklat Tahun 2023.....	9
Tabel 4.1	Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2023.....	12
Tabel 4.2	Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun 2023.....	13
Tabel 4.3	Gedung & Bangunan	14
Tabel 4.4	Daftar Rumah Dinas Pengadilan Negeri Lubuklinggau	17
Tabel 4.5	Daftar Kendaraan Bermotor Pengadilan Negeri Lubuklinggau	17
Tabel 4.6	Daftar Fasilitas Perkantoran.....	18
Tabel 4.7	Dukungan Teknologi Informasi.....	19
Tabel 4.8	Perkara Yang Didaftarkan Melalui E- <i>Court</i>	19
Tabel 6.1	Daftar Hakim Pengawas Bidang.....	26

BAB I PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum yang salah satu prinsip pentingnya adalah jaminan penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Perubahan kebijakan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1970 jo. Undang-undang No. 4 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun urusan organisasi, administrasi dan finansial berada satu atap di bawah Mahkamah Agung. Perubahan kebijakan tersebut membawa konsekuensi terhadap beban tugas dan tanggung jawab lembaga peradilan yang semakin luas dan kompleks.

Setelah diberlakukannya Undang-undang No.4 Tahun 2004 dan Keppres No. 21 Tahun 2004, Pengadilan Negeri merupakan Pengadilan tingkat pertama memiliki tugas dan tanggung jawab yang lebih luas yang menuntut perhatian yang lebih besar terhadap tata cara dan pelaksanaan administrasi peradilan, karena bukan saja menyangkut aspek ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi perkara, tetapi juga administrasi umum yang akan memengaruhi kelancaran penyelenggaraan peradilan itu sendiri. Terkait hal tersebut di atas administrasi peradilan dapat dibedakan jenisnya dan dipisahkan penanganannya ke dalam administrasi kepaniteraan dan administrasi kesekretariatan.

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang merupakan pengadilan tingkat pertama yang bertugas menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama bagi masyarakat para pencari keadilan dengan cakupan wilayah hukum meliputi Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara. Pengadilan Negeri Lubuklinggau memiliki visi **“Terwujudnya Pengadilan Negeri Lubuklinggau Yang Agung”**. Dalam upaya untuk mewujudkan

visi tersebut, Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah menyusun beberapa misi antara lain :

1. Mewujudkan Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Biaya Ringan dan Transparan.
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Pada Masyarakat.
3. Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan Yang Efektif dan Efisien.
4. Melaksanakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan Yang Efektif dan Efisien.
5. Mengupayakan Tersedianya Sarana dan Prasarana Peradilan Sesuai Dengan Standar.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan dipertanggung-jawabkan secara periodik yang dikenal pada tahun yang sudah berjalan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I pada bagian ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan).

Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan merupakan penjabaran dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat Pertama, Dengan demikian untuk peningkatan kinerja badan Peradilan umum perlu ditunjang oleh Sumber Daya Manusia yang Handal dan tepat guna dan juga mempunyai kualitas keterampilan individu (*skill individual*) yang baik, sehingga jalannya suatu organisasi dapat juga selaras dan berkesinambungan sesuai dengan pedoman yang telah menjadi Visi dan Misi Mahkamah Agung RI.

Dalam usaha pencapaian tegaknya hukum dan keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, maka dibuatlah program kerja yang mencakup hal-hal yang bersifat teknis peradilan dan juga hal-hal yang bersifat non teknis misalnya

sarana dan prasarana demi menunjang visi dan misi Pengadilan Negeri Lubuklinggau. Segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Lubuklinggau terangkum dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2023.

BAB II

ADMINISTRASI PERKARA

A. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN UMUM

Pengadilan Negeri Lubuklinggau merupakan Pengadilan Negeri Kelas 1A yang wilayah yurisdiksinya meliputi Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musirawas Utara. Pengadilan Negeri Lubuklinggau memiliki wewenang untuk mengadili perkara Perdata Gugatan dan Permohonan. Sedangkan untuk perkara Pidana Pengadilan Negeri Lubuklinggau mempunyai wewenang untuk mengadili Perkara Pidana antara lain Pidana Biasa, Pidana Cepat, Pidana Singkat dan Pidana Khusus Anak.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Perkara Berdasarkan Klasifikasi Perkara

No.	Aspek	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Sisa Tahun Ini
1.	Pidana Biasa	113	720	717	116
2.	Pidana Singkat	0	0	0	0
3.	Pidana Cepat	0	22	22	0
4.	Perkara Lalu Lintas	0	5448	5448	0
5.	Pidana Anak	0	46	44	2
6.	Praperadilan	0	4	4	0
7.	Gugatan	26	46	65	7
8.	Permohonan	5	66	68	3
9.	Gugatan Sederhana	14	29	41	2
10.	Konsinyasi	0	20	20	0
Total		158	6401	6429	130

B. PENYELESAIAN PERKARA

Pada awal tahun 2023 Pengadilan Negeri Lubuklinggau memprioritaskan penyelesaian perkara tahun lalu yang menjadi tunggakan atau belum terselesaikan tanpa mengesampingkan kualitas putusan. Keadaan perkara Pengadilan Negeri Lubuklinggau Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Rekapitulasi Penyelesaian Perkara Tahun 2023

No.	Aspek	Jumlah Perkara	Capaian	Persentase
1.	Jumlah Sisa Perkara Perdata Yang Diselesaikan	45	45	100%
2.	Jumlah Sisa Perkara Pidana Yang Diselesaikan	113	113	100%
3.	Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	193	181	94%
4.	Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	786	785	100%
5.	Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	981	915	93%
6.	Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	4	0	0%
5.	Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Dimediasi	29	6	21%
6.	Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi	8	4	50%

C. CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL

Program Prioritas Nasional pada Pengadilan adalah Pelayanan Bantuan Hukum diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan agar mendapatkan Pelayanan di Pengadilan. Beberapa Pelayanan untuk masyarakat kurang mampu adalah sebagai berikut :

1. Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)

Pos bantuan hukum adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan Tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman.

Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tahun 2023 mendapatkan anggaran untuk menyelenggarakan Pos Bantuan Hukum dengan anggaran sebesar Rp. 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah) untuk 240 Jam Pelayanan. Untuk melaksanakan Program tersebut Pengadilan Negeri Lubuklinggau bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum Posbakum SILAMPARI yang berdomisili di Kota Lubuklinggau.

Tabel 2.3
Realisasi Anggaran Pos Bantuan Hukum

Program	Pagu	Pagu	Realisasi
Pos Bantuan Hukum	Rp. 24.000.000,-	Rp. 24.000.000,-	100%

Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah dilaksanakan mulai tanggal 2 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023, dari rentang waktu selama 1 tahun terdapat 39 masyarakat yang dilayani oleh Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau.

2. Sidang di luar Gedung Pengadilan

Sidang di luar Gedung pengadilan adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya, tetapi di luar tempat kedudukan Gedung pengadilan dalam bentuk sidang keliling atau sidang di tempat sidang tetap.

Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tahun 2023 tidak memiliki program Sidang di luar Gedung Pengadilan.

3. Perkara Prodeo

Salah satu bentuk layanan hukum yang diberikan Pengadilan kepada masyarakat yang kurang mampu adalah perkara prodeo. Prodeo adalah pembebasan biaya perkara bagi masyarakat kurang mampu sehingga dalam berperkara di pengadilan, masyarakat kurang mampu tidak mengeluarkan biaya sama sekali.

Pada tahun 2023 tidak ada permohonan perkara secara prodeo yang masuk ke Pengadilan Negeri Lubuklinggau.

BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

A. KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA

Pengadilan Negeri Lubuklinggau hingga laporan ini dibuat mempunyai total 40 personil yang terdiri dari 12 Orang Hakim, 28 Orang Pegawai dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1

Daftar Nama seluruh personil Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tahun 2023

No.	Nama	Jabatan	Pangkat/Gol	Pendidikan
1.	Yunizar Kilat Daya, S.H., M.H	Ketua	IV/c	S2
2.	Agung Nugroho, S.H	Wakil Ketua	IV/b	S2
3.	Muhammad Deny Firdaus, S.H	Hakim	IV/a	S1
4.	Afif Januarsyah, S.H.,M.H	Hakim	IV/a	S2
5.	Verdian Martin, S.H	Hakim	IV/a	S1
6.	Lina Safitri Tazili, S.H	Hakim	IV/a	S1
7.	Yulia Marhaena, S.H	Hakim	IV/a	S1
8.	Tyas Listiani, S.H., M.H.	Hakim	IV/a	S2
9.	Ferri Irawan, S.H., M.H	Hakim	III/d	S2
10.	Tri Lestari, S.H.,M.H	Hakim	III/d	S2
11.	Amir Rizki Apriadi, S.H., M.H.	Hakim	III/d	S2
12.	Marselinus Ambarita, S.H.,M.H	Hakim	III/d	S2
13.	Irsanudin, SH., M.H.	Panitera	IV/a	S2
14.	Patra Sukma, S.Kom., S.H., M.H.	Sekretaris	III/d	S2
15.	Endrik PEDI Endora, S.H., M.H.	Panitera Muda Pidana	III/d	S2
16.	Dedy Sohaidi, S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum	III/d	S2
17.	Armen, A.Md.	Panitera Muda Perdata	III/c	DIII
18.	Mulyati, S.Sos.	Kasubag Umum dan Keuangan	III/d	S1
19.	Leni Sartika, S.H	Kasubag Kepegawaian dan Ortala	III/b	S1
20.	Anderiansyah, S.Kom., M.A.P.	Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan	III/d	S2
21.	Iawan Setiawan, S.T., S.H	Panitera Pengganti	III/d	S1
22.	Yessi Ervina, S.H	Panitera Pengganti	III/d	S1

23.	Alexander Pratama Hutajulu, S.H	Panitera Pengganti	III/d	S1
24.	Marlinawati	Panitera Pengganti	III/c	SMA
25.	Emi Huzaimah, A.Md	Panitera Pengganti	III/c	DIII
26.	Efendi Sulistiyo, S.T., S.H.	Panitera Pengganti	III/c	S1
27.	Rahmad Wahyudi, SH	Panitera Pengganti	III/c	S1
28.	Alkautsari Dewi Adha, A.Md	Panitera Pengganti	III/c	DIII
29.	Yosrizal, SH.	Juru sita	III/b	S1
30.	Rusman Edwar, S.Kom.	Juru sita	III/b	S1
31.	Riska Gita Anggraini, SH	Analisis Perkara Peradilan	III/b	S1
32.	Nevi Ermi Nengsih, S.E	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	III/a	S1
33.	Roli Rahmadya, S.H	Analisis Perkara Peradilan	III/a	S1
34.	Novi Arni, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	III/a	S1
35.	Ardi	Pengadministrasian Registrasi Perkara	III/a	SMA
36.	Sarah Attachira, A.Md	Pengelola Kepegawaian	II/d	DIII
37.	Siska Rince Manalu, A.Md. T	Pengelola Perkara	II/c	DIII
38.	Mutia Fadilah, A.Md	Pengelola BMN	II/c	DIII
39.	Dwi Friskasari, A.Md.A.B	Pengelola Perkara	II/c	DIII
40.	Intan Aprilia Putri A.Md, S.I	PPPK	-	DIII

B. MUTASI DAN PROMOSI

Selama tahun 2023 terdapat beberapa mutasi Hakim dan pegawai baik mutasi masuk maupun mutasi keluar, mutasi tersebut antara lain sebagai berikut :

Tabel 3.2
Daftar Promosi dan Mutasi Tahun 2023

No.	Nama	Jenis Mutasi	Jabatan/ Satuan Kerja Asal	Jabatan/ Satuan Kerja Tujuan	TMT
1.	Muhammad Deny Firdaus, S.H	Masuk	Hakim Pengadilan Negeri Demak	Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau	10/04/2023
2.	Intan Aprilia Putri, A.Md	Masuk	PPPK Arsiparis	PPPK Arsiparis Pengadilan Negeri Lubuklinggau	01/09/2023
3.	Wahyu Agus Susanto, S.H.,M.H	Keluar	Panmud Pidana Pengadilan Negeri Lubuklinggau	Panmud Pidana Pengadilan Negeri Palembang	11/08/2023

4.	Yulia Marhaena, S.H	Keluar	Hakim pengadilan Negeri Lubuklinggau	Hakim Pengadilan Negeri Depok	04/12/2023
5.	Riska Gita Anggraini, S.H	Keluar	Analisis Perkara Peradilan	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lahat	21/12/2023
6.	Agung Nugroho, S.H	Keluar	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sleman	29/12/2023
7.	Rahmad Wahyudi, S.H	Keluar	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lubuklinggau	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palembang	29/12/2023
8.	Muhammad Deny Firdaus	Keluar	Hakim pengadilan Negeri Lubuklinggau	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun	29/12/2023

C. Pensiun

Dalam kurun waktu dari Januari s/d Desember 2023 terdapat 1 Orang yang pensiun pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau. Pegawai yang pensiun antara lain sebagai berikut.

Tabel 3.3
Daftar Pensiun Tahun 2023

No.	Nama	Jabatan	Pangkat Golongan/ Ruang	Keterangan
1.	RUSMIATI NIP. 196510201988032002	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Penata TK 1 III/d	Mencapai BUP TMT Oktober 2023

D. Pendidikan dan Pelatihan

Pada tahun 2023 terdapat beberapa orang yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan antara lain sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pegawai yang mengikuti diklat tahun 2023

No.	Nama	Jabatan	Nama Diklat	Keterangan
1.	YUNIZAR KILAT DAYA, S.H.,M.H	Ketua	Pelatihan Sertifikasi Niaga Bidang Kepailitan dan PKPU bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Umum Seluruh Indonesia	Tahap I: 10 s.d 14 April 2023 Tahap II: 2 s.d 13 Mei 2023
			Pelatihan Sertifikasi Niaga Bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Umum Seluruh Indonesia	Tahap I: 29 Mei s.d 06 Juni 2023 Tahap II: 11 s.d 24 Juni 2023
			Pelatihan Eksporasi Pelanggaran KEPPH: Studi Kasus Laporan	29 Agustus s.d 01 September 2023

			Masyarakat di Komisi Yudisial	
2.	AGUNG NUGROHO, S.H	Wakil Ketua	Pelatihan Teknis Yudisial Bukti Elektronik bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Umum dan Peradilan Agama Seluruh Indonesia	Tahap I: 27 Februari s.d 3 Maret 2023 Tahap II: 5 s.d 11 Maret 2023
			Pelatihan Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Terpadu Gelombang II bagi Aparat Penegak Hukum Seluruh Indonesia	Tahap I: 24 s.d 28 Juli 2023 Tahap II: 30 Juli s.d 12 Agustus 2023
			Pelatihan Sertifikasi Hakim Tindak Pidana Korupsi Angkatan XXV bagi Hakim Karier dan Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi	Tahap I: 04 s.d 09 September 2023 Tahap II: 10 s.d September 2023
			Bimbingan Teknis Pengembangan Kompetensi ASN melalui Pembangunan Zona Integritas pada Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja di Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri Se-Sumatera Selatan	22 s.d 24 November 2023
3.	TYAS LISTIANI, S.H., M.H	Hakim	Pelatihan Teknis Yudisial Tindak Pidana Kekerasan Seksual Bagi Hakim Peradilan Umum Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan Sumatera Selatan	Tahap 1: 20 s.d 24 Februari 2023 Tahap II: 27 Februari s.d 4 Maret 2023
4.	YULIA MARHAENA, S.H	Hakim	Pelatihan Teknis Yudisial Tindak Pidana Kekerasan Seksual Bagi Hakim Peradilan Umum Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan Sumatera Selatan	Tahap 1: 20 s.d 24 Februari 2023 Tahap II: 27 Februari s.d 4 Maret 2023
5.	VERDIAN MARTIN, S.H	Hakim	Pelatihan Teknis Yudisial Tindak Pidana Kekerasan Seksual Bagi Hakim Peradilan Umum Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan Sumatera Selatan	Tahap 1: 20 s.d 24 Februari 2023 Tahap II: 27 Februari s.d 4 Maret 2023
			Pelatihan Teknis Sertifikasi Mediator bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Umum Seluruh Indonesia	Tahap I: 5 Mei s.d 19 Mei 2023 Tahap II: 21 s.d 31 Mei 2023
6.	LINA SAFITRI TAZINI, S.H	Hakim	Pelatihan Teknis Sertifikasi Mediator bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Umum Seluruh Indonesia	Tahap I: 5 Mei s.d 19 Mei 2023 Tahap II: 21 s.d 31 Mei 2023
7.	IRSANUDIN, S.H.,M.H	Panitera	Bimbingan Teknis Pengembangan Kompetensi ASN melalui Pembangunan Zona	22 s.d 24 November 2023

			Integritas pada Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja di Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri Se-Sumatera Selatan	
8.	PATRA SUKMA, S.Kom.,S.H.,M.H	Sekretaris	Bimbingan Teknis Pengembangan Kompetensi ASN melalui Pembangunan Zona Integritas pada Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja di Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri Se-Sumatera Selatan	22 s.d 24 November 2023
9.	ANDERIANSYAH, S.Kom., M.A.P	Kasubbag PTIP	Pelatihan Online Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Integratif (SPIP) Angkatan VII dari Tempat Tugas Tahun 2023	05 s.d 09 Juni 2023
			Bimbingan Teknis Pengembangan Kompetensi ASN melalui Pembangunan Zona Integritas pada Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja di Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri Se-Sumatera Selatan	22 s.d 24 November 2023
10.	LENI SARTIKA, S.H	BENDAHARA	Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1 Model MOOC Batch VI	19 Oktober s.d 30 November 2023
11.	ROLI RAHMADYA, S.H	Analisis Perkara Peradilan	Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1 Model MOOC Batch VI	19 Oktober s.d 30 November 2023
12.	NOVI ARNI, S.H	Analisis Perkara Peradilan	Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1 Model MOOC Batch VI	19 Oktober s.d 30 November 2023
13.	SARAH ATTACHIRAH, A.Md. T	Pengelola Kepegawaian	Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1 Model MOOC Batch VI	19 Oktober s.d 30 November 2023
14.	MUTIA FADILAH, A.Md	Pengelola BMN	Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1 Model MOOC Batch VI	19 Oktober s.d 30 November 2023
15.	DWI FRISKASARI, A.Md.A.B	Pengelola Perkara	Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1 Model MOOC Batch VI	19 Oktober s.d 30 November 2023
16.	INTAN APRILIA PUTRI A.Md S.I	Arsiparis Pelaksana	Pelatihan Orientasi PPPK Mahkamah Agung RI Angkatan II Tahun 2023	25 September s.d 20 Oktober 2023

BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA & PRASARANA SERTA TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Anggaran keuangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau sering dikenal dengan DIPA. Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tahun 2023 memiliki 2 DIPA, yakni DIPA Badan Urusan Administrasi dengan Nomor : DIPA- 005.01.2.098970/2023 dengan total pagu Rp. 8.397.210.000,- (Delapan Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) dan DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : DIPA- 005.03.2.099229/2023 dengan total pagu Rp. 378.300.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

1. DIPA Badan Urusan Administrasi (01)

DIPA Badan Urusan Administrasi meliputi anggaran belanja gaji pegawai, belanja barang Operasional, Belanja Barang Non Operasional dan belanja modal. Berikut disajikan secara rinci anggaran pada tahun 2023.

Tabel 4.1
Realisasi Anggaran DIPA 01

No.	Akun	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa	%
1.	1066.962	Layanan Umum [Base Line]				
2.	051	Non Operasional Satker Daerah	6.669.000	6.125.000	544.000	91,84
3.	1066.994	Layanan Perkantoran [Base Line]				
4.	001	Gaji dan Tunjangan	5.650.293.000	5.649.562.566	730.434	99,99
5.	002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.895.118.000	1.852.192.885	42.925.115	97,73
4.	1071.951	Layanan Sarana Internal (<i>Overhead</i>) [Base Line]				
6.	051	Pengadaan Kendaraan Bermotor	327.000.000	327.000.000	0	100
7.	052	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	19.380.000	18.256.000	1.124.000	94,20
8.	053	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	498.750.000	498.750.000	0	100
Total			8.397.210.000	8.351.886.451	45.323.549	99,46

2. DIPA Dirjen Badilum (03)

DIPA Dirjen Badilum meliputi anggaran belanja Pos Bantuan Hukum dan Penyelesaian perkara di tingkat pertama. Berikut disajikan secara rinci anggaran pada tahun 2023.

Tabel 4.2
Realisasi Anggaran DIPA 03

No.	Akun	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa	%
1.	1049.001	Percepatan Penyelesaian Perkara				
2.	052	Dukungan Penyelesaian Perkara	1.500.000	1.500.000	0	100
3.	1049.005	PERKARA PIDANA YANG DISELESAIKAN DI TINGKAT PERTAMA DI WILAYAH PALEMBANG				
4.	051	Pendaftaran Berkas Perkara	121.800.000	121.306.500	493.500	99,59
5.	052	Penetapan Hari Sidang	48.720.000	48.510.000	210.000	99,57
6.	053	Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	48.720.000	48.720.000	0	100
7.	054	Pemeriksaan Disidang Pengadilan	42.870.000	39.005.000	3.865.000	90,98
8.	055	Pengiriman petikan/Salinan Putusan Kepada JPU & Terdakwa	48.720.000	47.950.000	770.000	98,42
9.	056	Minutasi	15.120.000	14.319.000	801.000	94,70
10.	057	Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama	16.100.000	16.100.000	0	100
11.	058	Penanganan Perkara Kasasi & PK di Tingkat pertama	10.750.000	10.664.000	86.000	99,20
12.	1049.032	Layanan Pos Bantuan Hukum [Base Line]				
13.	051	Pos Bantuan Hukum	24.000.000	24.000.000	0	100%
Total			378.300.000	372.074.500	6.225.500	98,35

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Pengelolaan sarana dan prasarana adalah kegiatan mengendalikan, menyelenggarakan, mengurus, menjalankan dan memanfaatkan sarana dan prasarana agar tetap dalam kondisi yang baik sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Sarana dan prasarana yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau meliputi Gedung dan Bangunan, Tanah, Kendaraan Bermotor serta fasilitas perkantoran.

1. Gedung dan Bangunan

Tabel 4.3
Gedung & Bangunan

No.	Jenis Sarana	Uraian	Keterangan
1	GEDUNG KANTOR	Tanah Gedung Kantor	- Luas Tanah 4.530 M ² - Sertifikat Hak Pakai Nomor 09 / Sidorejo Tahun 1988 An. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Mahkamah Agung Republik Indonesia
		Bangunan Gedung Kantor	- Dibangun Tahun 1974 - Luas Bangunan 1.120 M ² - Belum Prototipe (Sedang Dilakukan Pembangunan) - Alamat Jl. Depati Said No.1 Kelurahan Tapak Lebar Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau
2	RUANG KERJA	Ruang Ketua	- Luas Ruangan 35 M ² - Dilengkapi Dengan Pendingin Udara (AC)
		Ruang Wakil Ketua	- Luas Ruangan 32M ² - Dilengkapi Dengan Pendingin Udara (AC)
		Ruang Hakim	- Luas Ruangan 96 M ² - Dilengkapi Dengan Pendingin Udara (AC)
		Ruang Panitera	- Luas Ruangan 32 M ² - Dilengkapi Dengan Pendingin Udara (AC)
		Ruang Panitera Muda	- Luas Ruangan 54 M ² - Dilengkapi Dengan Pendingin Udara (AC)
		Ruang Panitera Pengganti	- Luas Ruangan 30 M ² - Dilengkapi Dengan Pendingin Udara (AC)
		Ruang Juru sita dan Juru Sita Pengganti	- Luas Ruangan 30 M ² - Dilengkapi Dengan Pendingin Udara (AC)
		Ruang Sekretaris	- Luas Ruangan 12 M ² - Dilengkapi Dengan Pendingin Udara (AC)
		Ruang Kepala Sub Bagian	- Luas Ruangan 12 M ² - Dilengkapi Dengan Pendingin Udara (AC)
		Ruang Kesekretariatan	- Luas Ruangan 12M ² - Dilengkapi Dengan Pendingin Udara (AC)
		Ruang Jaksa Penuntut Umum	- Luas Ruangan 12M ² - Dilengkapi Dengan Pendingin Udara (AC)
		Ruang Penasihat Hukum	- Luas Ruangan 12M ² - Dilengkapi Dengan Pendingin Udara (AC)
		Ruang Rapat	- Luas Ruangan 28M ² - Dilengkapi Dengan Pendingin Udara (AC)
		Ruang Perpustakaan	- Luas Ruangan 54 M ² - Terdapat 7.750 Buah Koleksi Buku - Dilengkapi Dengan Pendingin Udara (AC)
		Ruang Arsip	- Luas Ruangan 60 M ² - Dilengkapi Dengan Komputer Untuk Pengarsipan Secara Elektronik - Dilengkapi Rak Arsip Terbuat Dari Besi/Metal - Dilengkapi Dengan Pendingin Udara (AC)
		Ruang Gudang	- Luas Ruangan 60 M ²
Ruang Server	- Luas Ruangan 4 M ² - Dilengkapi Dengan Pendingin Udara (AC)		

		Ruang Poliklinik	<ul style="list-style-type: none"> - Luas Ruangan 9 M² - Dilengkapi dengan Obat-Obatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK) - Dilengkapi Dengan Pendingin Udara (AC)
		Ruang Toilet Pegawai Pria	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat 2 Unit - Ukuran Masing-Masing 6 M²
		Ruang Toilet Pegawai Wanita	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat 2 Unit - Ukuran Masing-Masing 6 M²
		Ruang Tamu Terbuka	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat pada Bagian Depan Gedung (Lobi) - Dilengkapi Dengan Sofa - Ruangan Terbuka (Tidak Tertutup) - Sesuai dengan SE Dirjen Badilum Nomor 1/DJU/SE/V/2012 Tentang Penyediaan Ruang Tamu Terbuka Pada Pengadilan Negeri Seluruh Indonesia
3	SARANA LINGKUNGAN GEDUNG KANTOR	Pagar Keliling	<ul style="list-style-type: none"> - Panjang Pagar 286 M - Tinggi ± 3 Meter - Terbuat dari Beton (Batu Bata)
		Pos Jaga	<ul style="list-style-type: none"> - Luas Ruangan 6 M² - Terdapat pada bagian depan Gedung kantor
		Tempat Parkir Kendaraan	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat 2 area parkir yaitu parkir Kendaraan Roda 2 dan Roda 4
		Akses Jalan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengerasan Jalan Menggunakan <i>Paving Block</i>
		Taman	<ul style="list-style-type: none"> - Dilengkapi dengan Bunga dan Pohon Hias - Terdapat Kolam Ikan Koi
		Akses Difabel	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat jalur Khusus untuk penyandang disabilitas - Terdapat Step (Ram) pada Lobi Kantor untuk penyandang disabilitas yang menggunakan Kursi Roda
		Kamera Keamanan (CCTV)	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat 16 Titik Kamera CCTV <i>Full HD</i>
4	RUANG PELAYANAN	Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	<ul style="list-style-type: none"> - Luas Ruangan 96 M² - Terletak di Bagian Gedung Kantor (Lobi Gedung) - Dilengkapi Dengan Pendingin Udara (AC) - Dilengkapi Dengan Televisi - Dilengkapi Dengan Media Informasi - Dilengkapi Dengan Komputer Untuk Proses Pelayanan - Dilengkapi Dengan Kursi Tunggu - Dilengkapi Dengan Mesin Antrean - Dilengkapi Dengan WIFI untuk Pengguna Layanan - Dilengkapi Dengan Kursi Roda Untuk Penyandang Disabilitas - Dilengkapi Dengan Toilet - Dilengkapi Dengan Air Minum dan Gelas Untuk Pengguna Layanan - Dilengkapi Dengan <i>Charger Box</i>
		Loket Pembayaran (Kasir)	<ul style="list-style-type: none"> - Luas Ruangan 5 M² - Terdapat pada Lobi Pengadilan (satu area dengan PTSP)

		<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia Mesin EDC (<i>Electronic Data Capture</i>)
	Ruang Sidang	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat 3 Ruang Sidang (Cakra, Candra dan Tirta) - Luas Ruangan Masing-Masing <ul style="list-style-type: none"> Cakra : 120 M² Candra : 70 M² Tirta : 70 M² - Dilengkapi Dengan Pendingin Udara (AC) di setiap Ruangannya - Dilengkapi Dengan sarana dan Prasarana Ruang Sidang Seperti mebel, Bendera, Lambang Garuda, Palu dan Lain-lain
	Ruang Sidang Anak	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat 1 Ruang Sidang Anak - Luas Ruangan 50 M² - Dilengkapi Dengan Pendingin Udara (AC) - Sesuai Dengan Keputusan Dirjen Badilum Nomor 2176/DJU/SK/PS01/12/2017 Tentang Pedoman Standar Minimal Sarana dan Prasarana Pengadilan Ramah Anak
	Ruang Tunggu Sidang	<ul style="list-style-type: none"> - Luas Ruangan 150 M² - Dilengkapi Dengan Pendingin Udara (AC) - Dilengkapi Dengan Televisi - Dilengkapi Dengan Media Informasi - Dilengkapi Dengan Kursi Tunggu - Dilengkapi Dengan Petugas Informasi Persidangan (Konfirmasi & Antrean Sidang) - Dilengkapi Dengan WIFI untuk Pengunjung Sidang - Dilengkapi Dengan Kursi Roda Untuk Penyandang Disabilitas - Dilengkapi Dengan Toilet Perempuan dan Laki-Laki - Dilengkapi Dengan Air Minum dan Gelas Untuk Pengguna Layanan - Dilengkapi Dengan <i>Charger Box</i>
	Ruang Pos Pelayanan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Luas Ruangan 12 M² - Dilengkapi Dengan Pendingin Udara (AC)
	Ruang Informasi Persidangan (Konfirmasi dan Antrean Sidang)	<ul style="list-style-type: none"> - Luas Ruangan 12 M² - Dilengkapi Dengan Antrean Sidang - Dilengkapi Dengan Pengeras Suara
	Ruang Tahanan Pria	<ul style="list-style-type: none"> - Luas Ruangan 60 M² - Dilengkapi Dengan Toilet - Dilengkapi Dengan Perlengkapan Ibadah
	Ruang Tahanan Wanita	<ul style="list-style-type: none"> - Luas Ruangan 60 M² - Dilengkapi Dengan Toilet - Dilengkapi Dengan Perlengkapan Ibadah
	Ruang Ramah & Tunggu Anak	<ul style="list-style-type: none"> - Luas Ruangan 30 M² - Terpisah Antara Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan - Dilengkapi Dengan Toilet (Laki-Laki dan Perempuan) - Dilengkapi Dengan Buku-Buku Anak dan Perlengkapan Ibadah - Sesuai Dengan Keputusan Dirjen Badilum Nomor 2176/DJU/SK/PS01/12/2017

			Tentang Pedoman Standar Minimal Sarana dan Prasarana Pengadilan Ramah Anak
	Ruang Mediasi	-	Luas Ruang 30 M ² - Dilengkapi Dengan Pendingin Udara (AC) - Dilengkapi Dengan Meubelair
	Ruang Kaukus	-	Luas Ruang 30 M ² - Dilengkapi Dengan Pendingin Udara (AC) - Dilengkapi Dengan Meubelair
	Ruang Laktasi	-	Luas Ruang 24 M ² - Dilengkapi Dengan Pendingin Udara (AC) - Dilengkapi Dengan Tempat Tidur Untuk Menyusui
	Toilet Umum Pria	-	Luas Ruang 6 M ² - Terdapat 2 Toilet Pria
	Toilet Umum Wanita	-	Luas Ruang 6 M ² - Terdapat 2 Toilet Wanita
	Toilet Khusus Difabel	-	Luas Ruang 6 M ²
	Mushallah	-	Luas Ruang 45 M ² - Dilengkapi Dengan Pendingin Udara (AC) - Dilengkapi Dengan Tempat Wudu - Dilengkapi Dengan Pengeras Suara - Dilengkapi Dengan Peralatan Ibadah

2. Rumah Dinas

Tabel 4.4
Daftar Rumah Dinas Pengadilan Negeri Lubuklinggau

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Ket
			B	RR	RB	
1.	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	2	1	0	1	
2.	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	9	9	0	0	
Total		11	10	0	1	

3. Kendaraan Bermotor

Tabel 4.5
Daftar Kendaraan Bermotor Pengadilan Negeri Lubuklinggau

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Ket
			B	RR	RB	
Kendaraan Bermotor Roda 4						
1.	Innova	1	√			
2.	Avanza	2	√			
3.	Expander	1	√			
Kendaraan Bermotor Roda 2						
1.	Honda Supra	3	√			

4. Fasilitas Perkantoran

Tabel 4.6
Daftar Fasilitas Perkantoran

No	Uraian	Jumlah	Ket
1.	Lemari Penyimpan	3	Baik
2.	Mesin Ketik Listrik Standard (14-16)	1	Baik
3.	Lemari Besi/Metal	11	Baik
4.	Lemari Kayu	1	Baik
5.	Rak Kayu	10	Baik
6.	Brandkas	3	Baik
7.	Hand Metal Detector	1	Baik
8.	LCD Projector/Infocus	1	Baik
9..	Proyector Spider Bracket	2	Baik
10.	Meja Kerja Besi/Metal	1	Baik
11.	Meja Kerja Kayu	63	Baik
12.	Kursi Besi/Metal	129	Baik
13.	Kursi Kayu	82	Baik
14.	Sice	4	Baik
15.	Bangku Panjang Kayu	6	Baik
16.	Meja Rapat	2	Baik
17.	Partisi	6	Baik
18.	Meubelair Lainnya	1	Baik
19.	A.C. Split	24	16 Baik, 8 Rusak Ringan
20.	Televisi	10	Baik
21.	Loudspeaker	5	Baik
22.	Microphone	1	Baik
23.	Mimbar/Podium	1	Baik
24.	Palu Sidang	3	Baik
25.	Lambang Instansi	1	Baik
26.	Gordyin/Kray	1	Baik
27.	Bracket Standing Peralatan	4	Baik
28.	Audio Amplifier	1	Baik
29.	Uninterruptible Power Supply (UPS) Video	7	Baik
30.	Mixer	1	Baik
31.	Camera Digital	1	Baik
32.	Camera Conference	1	Baik
33.	Alat Kesehatan Umum Lainnya	1	Baik
34.	Komputer Phantombild	4	Baik
35.	Kursi Dorong	5	Baik
36.	Microphone Connector Box	2	Baik
37.	Komputer Jaringan Lainnya	1	Baik
38.	P.C Unit	38	Baik
39.	Lap Top	20	Baik
40.	Tablet PC	1	Baik
41.	Komputer Unit Lainnya	1	Baik
42.	Serial Printer	1	Baik

43.	CPU (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
44.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	27	Baik
45.	Scanner (Peralatan Personal)	4	Baik
46.	Server	2	Baik
47.	Router	1	Baik
48.	Rak Server	1	Baik
49.	Closed Circuit Television (CCTV)	1	Baik
50.	CCTV- Camera Control Television System	1	Baik
51.	Genset	2	Baik
52.	Server Komputer	1	Baik

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Dukungan penerapan teknologi informasi yang dilakukan pada tahun 2023 antara lain pengadaan jaringan Internet *dedicated* 1:1 dengan *Bandwidth* sebesar 100 Mbps, serta Pengadaan PC bagi Panitera.

Tabel 4.7
Dukungan Teknologi Informasi

No	Uraian	Jumlah	Ket
1.	Jaringan	1	<i>Dedicated</i> 1:1 100Mbps
2.	Laptop/PC	58	
3.	Server	2	Server SIPP & Aplikasi Lainnya
4.	Printer	27	
5.	Scanner	4	

1. Implementasi E-Court

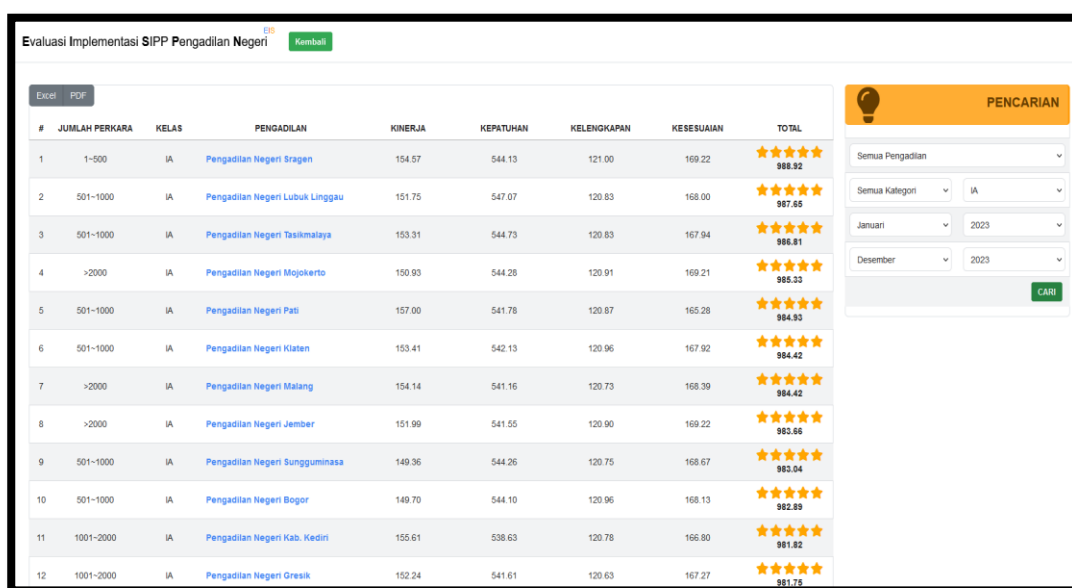
Penerapan Electronic *Court* atau sering dikenal dengan istilah *E-Court* pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah dimulai sejak tahun 2018. Pada tahun 2023 perkara yang didaftarkan melalui *ecourt* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8
Perkara yang didaftarkan melalui *E-Court*

No.	Uraian	Daftar Melalui <i>E-Court</i>	Sepakat E-Litigasi	Banding Melalui <i>E-Court</i>
1.	Gugatan	46	13	11
2.	Gugatan Sederhana	29	0	0
3.	Bantahan	0	0	0
4.	Permohonan	66	0	0
Total		141	13	11

2. Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tahun 2023 sudah baik. Hal tersebut terbukti dari penilaian Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (EIS) yang selalu mencukupi atau memenuhi target yang telah ditetapkan. Dengan tercapainya nilai EIS yang konstan setiap tahun maka Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah diberikan izin oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum untuk menggunakan register elektronik secara penuh dan meninggalkan register manual. Pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Lubuklinggau mendapatkan nilai Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) Sebesar **987.65**. Dengan nilai tersebut Pengadilan Negeri Lubuklinggau berhasil menduduki peringkat ke 2 Pengadilan Negeri Kelas 1A seluruh Indonesia.



#	JUMLAH PERKARA	KELAS	PENGADILAN	KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	KESESUAIAN	TOTAL
1	1-500	IA	Pengadilan Negeri Sragen	154.57	544.13	121.00	169.22	989.92
2	501-1000	IA	Pengadilan Negeri Lubuk Linggau	151.75	547.07	120.83	168.00	987.65
3	501-1000	IA	Pengadilan Negeri Tasikmalaya	153.31	544.73	120.83	167.94	986.81
4	>2000	IA	Pengadilan Negeri Mojokerto	150.93	544.28	120.91	169.21	985.33
5	501-1000	IA	Pengadilan Negeri Pati	157.00	541.78	120.87	165.28	984.93
6	501-1000	IA	Pengadilan Negeri Klaten	153.41	542.13	120.96	167.92	984.42
7	>2000	IA	Pengadilan Negeri Malang	154.14	541.16	120.73	168.39	984.42
8	>2000	IA	Pengadilan Negeri Jember	151.99	541.55	120.90	169.22	983.66
9	501-1000	IA	Pengadilan Negeri Sungguminasa	149.36	544.26	120.75	168.67	983.04
10	501-1000	IA	Pengadilan Negeri Bogor	149.70	544.10	120.96	168.13	982.89
11	1001-2000	IA	Pengadilan Negeri Kab. Kediri	155.61	538.63	120.78	166.80	981.82
12	1001-2000	IA	Pengadilan Negeri Gresik	152.24	541.61	120.63	167.27	981.75

Gambar 4.1
Evaluasi Implementasi SIPP Pengadilan Negeri Kelas 1A Tahun 2023

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

Pengadilan Negeri Lubuklinggau selalu berupaya untuk meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat. Berikut beberapa program yang dilakukan Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat.

1. PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Zona Integritas atau sering dikenal dengan istilah ZI adalah predikat yang diberikan kepada satuan kerja yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Zona Integritas merupakan Langkah-langkah konkret untuk mencapai dua sasaran utama Reformasi Birokrasi yaitu Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan Peningkatan Pelayanan Publik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya menjadi landasan dalam pelaksanaan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau.



Gambar 5.1
Piagam Penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah berhasil meraih predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi pada Tahun 2020. Saat ini pelaksanaan Pembangunan zona integritas masih terus berlanjut untuk menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah melakukan penetapan program pembangunan Zona Integritas yang disesuaikan dengan hasil identifikasi jenis layanan utama, isu strategis dan risiko-risiko yang dihadapi. Selanjutnya Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah membentuk tim kerja untuk melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan dengan sebelumnya Menyusun terlebih dahulu rencana kerja atau rencana aksi yang terukur dan memiliki target.

2. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah dilaksanakan pada tahun 2018 tepatnya bulan Maret 2018. Seluruh pelayanan di Kepaniteraan di jadikan satu pintu, sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan akan dilayani dari awal hingga selesainya layanan di satu pintu. Hal ini

diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Lubuklinggau kepada masyarakat.

Pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Lubuklinggau mendapatkan Peringkat 3 kategori Pengadilan Negeri Kelas 1A terbaik dalam lomba Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melalui Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1817/DJU/SK.TI2.1.2/XI/2023 tentang Penetapan Pemenang Lomba Bagi Satuan Kerja di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2023.



Gambar 5.2

Piagam Penghargaan Lomba Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023

3. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Dalam rangka meningkatkan Pelayanan publik, Pengadilan Negeri Lubuklinggau melakukan beberapa inovasi antara lain:

- a) Layanan Antar Jemput Prioritas dan Manula (LAJU PRIMA)

LAJU PRIMA adalah Inovasi Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang di prioritaskan untuk pengguna layanan penyandang disabilitas dan lanjut usia yang perlu sarana/ bantuan untuk pergi ke Pengadilan Negeri Lubuklinggau.



Gambar 5.3
Layanan Antar Jemput Prioritas dan Manula

Dalam hal ini pengguna layanan terlebih dahulu harus menghubungi petugas melalui Telepon/WA/Zoom Pengadilan Negeri Lubuklinggau, kemudian petugas akan memproses dan menghubungi kembali pengguna layanan. Selanjutnya petugas akan mendatangi pengguna layanan ke rumah mereka masing-masing untuk membantu antar jemput pengguna layanan yang akan membuat keperluan di kantor Pengadilan Negeri Lubuklinggau seperti surat keterangan dan lain sebagainya. Setelah selesai petugas layanan Pengadilan Negeri Lubuklinggau akan mengantarkan kembali pengguna layanan ke rumah masing-masing.

b) Sistem Informasi Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana (SITAPURANA)

SITAPURANA atau Sistem Informasi Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana adalah penyampaian putusan pidana secara elektronik kepada terdakwa, Lembaga Pemasyarakatan, Jaksa Penuntut Umum dan Juga Penyidik. Aplikasi ini digunakan untuk mempercepat penyampaian putusan perkara pidana kepada para pihak adan juga Aparat Penegak Hukum. Dengan dipercepatnya pengiriman salinan putusan kepada para pihak maka diharapkan eksekusi terhadap terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dapat dipercepat yang nantinya juga dapat mengurangi *Over Stay* pada Lembaga Pemasyarakatan.



The screenshot displays the 'Data Putusan Perkara Pidana Yang Belum Dikirim' (Criminal Judgment Data Not Yet Sent) interface. It features a red header with a 'Kirim Via Whatsapp & E-Mail' button and a notification that data will be sent automatically via WhatsApp and E-Mail at 09:00 WIB and 15:00 WIB. Below the header is a table with columns for 'No.', 'Nomor Perkara', 'Nama Pihak', 'E-Doc TTE', 'Lembaga Pemasyarakatan', and 'Aksi'. Two entries are visible, each with a 'Kirim' button and a PDF icon.

No.	Nomor Perkara	Nama Pihak	E-Doc TTE	Lembaga Pemasyarakatan	Aksi
1	633/Pid.B/2021/PN Lig Tanggal Putusan : 29/11/2021	Penuntut Umum: Yesi Imelda, SH Terdakwa: Agung Prayogo bin Zaini	PDF	LAPAS KELAS II A LUBUK LINGGAU	Kirim
2	630/Pid.Sus/2021/PN Lig Tanggal Putusan : 24/11/2021	Penuntut Umum: Trian Febriansyah, SH., MH. Terdakwa: Efendi Ayatullah bin Kabul	PDF	LAPAS NARKOTIKA KELAS II A MUARA BELITI	Kirim

Gambar 5.5
Screenshoot Sistem Informasi Pemberitahuan Putusan Perkara Pidana
(SITAPURANA)

BAB VI PENGAWASAN

Pengawasan pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau berpedoman kepada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan. Terdapat 2 jenis pengawasan yakni :

1. Pengawasan Melekat

Yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan.

2. Pengawasan Fungsional

Yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Menindaklanjuti hal tersebut Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau menerbitkan surat keputusan Nomor : W6.U5/09/KP.04.1/01/2023 Tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang dengan susunan sebagai berikut :

Tabel 6.1
Hakim Pengawas Bidang

No.	Nama	Bidang Pengawasan
1.	Agung Nugroho, S.H	Koordinator
2.	Afif Januarsyah, S.H.,M.H	Pidana
3.	Tyas Listiani, S.H., M.H.	PTSP
4.	Yulia Marhaena, SH	Perdata
5.	Verdian Martin, S.H.	Umum dan Keuangan
7.	Lina Safitri Tazili, S.H.	Hukum
8.	Tri Lestari, S.H., M.H.	Kepegawaian dan Ortala
9.	Ferri Irawan, S.H., M.H.	Minutasi, Upaya Hukum dan Delegasi
10.	Marselinus Ambarita, S.H., M.H.	PTIP
11.	Amir Rizki Apriadi, S.H., M.H.	Kimwasmat

Dengan surat keputusan ini diharapkan pengawasan pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau dapat berjalan dengan baik sehingga hasil dari pengawasan dapat

digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan.

A. INTERNAL

Pengawasan internal pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau dilaksanakan secara rutin baik secara langsung yakni dengan cara melakukan pemeriksaan langsung maupun secara tidak langsung dengan cara melakukan pengujian atau penilaian atas laporan atau isi dokumen. Objek dari pengawasan yang dilakukan meliputi :

1. Manajemen Peradilan
 - a. Program kerja;
 - b. Pelaksanaan/Pencapaian Target;
 - c. Pengawasan dan Pembinaan;
 - d. Kendala dan hambatan;
 - e. Faktor-faktor pendukung;
 - f. Evaluasi kegiatan.
2. Administrasi Perkara
 - a. Prosedur penerimaan perkara;
 - b. Prosedur penerimaan permohonan banding;
 - c. Prosedur penerimaan permohonan kasasi;
 - d. Prosedur penerimaan permohonan peninjauan kembali;
 - e. Prosedur penerimaan permohonan grasi;
 - f. Keuangan perkara;
 - g. Pemberkasan perkara dan kearsipan;
 - h. Pelaporan;
3. Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan
 - a. Sistem pembagian perkara dan penentuan majelis hakim;
 - b. Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara;

- c. Minutasi perkara;
 - d. Pelaksanaan putusan (Eksekusi).
4. Administrasi Umum
- a. Kepegawaian;
 - b. Keuangan;
 - c. Inventaris;
 - d. Perpustakaan, tertib persuratan dan perkantoran.
5. Kinerja Pelayanan Publik
- a. Pengelolaan manajemen;
 - b. Mekanisme pengawasan;
 - c. Kepemimpinan;
 - d. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia;
 - e. Pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - f. Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapihan;
 - g. Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara;
 - h. Tingkat pengaduan masyarakat.

Dari pengawasan yang dilakukan selama tahun 2023 terdapat berbagai temuan, lalu dilakukan klarifikasi oleh pimpinan objek pengawasan selanjutnya berbagai temuan tersebut dituangkan ke dalam laporan hasil pemeriksaan, untuk hal yang memerlukan adanya perbaikan maka Pimpinan objek pengawasan diminta untuk menandatangani kontrak kinerja bahwa ia bersedia untuk melakukan perbaikan dalam kurun waktu tertentu.

B. EVALUASI

Evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan dilakukan dilakukan setiap bulan oleh pimpinan pengadilan yakni Ketua Pengadilan dan Wakil Ketua Pengadilan melalui laporan pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing hakim pengawas. Dari laporan pengawasan tersebut, pimpinan pengadilan dapat mengetahui kendala -kendala yang sedang dihadapi dalam melaksanakan tugas

serta dapat menilai pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas. Dari evaluasi pengawasan ini nantinya dapat dirumuskan solusi dan kebijakan yang akan diambil guna menyelesaikan kendala dan hambatan yang ada.

BAB VII PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengadilan Negeri Lubuklinggau sebagai Pengadilan Tingkat Pertama telah berupaya secara maksimal untuk mewujudkan visi dan misi pengadilan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang terbatas telah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat para pencari keadilan.
2. Proses penyelenggaraan administrasi peradilan maupun administrasi umum telah berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), walaupun masih terdapat berbagai kekurangan karena terbatasnya sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana pendukung lainnya.
3. Seluruh kegiatan penyelenggaraan peradilan tidak terlepas dari pengawasan internal, Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Wakil Ketua dan serta jajaran Hakim Pengawas pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau.

B. REKOMENDASI

1. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi penyelenggaraan peradilan, maka perlu secara bertahap diupayakan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai guna menunjang kelancaran, kenyamanan dan kualitas kinerja.
2. Agar dilakukan pelatihan dan pembinaan secara berkelanjutan kepada seluruh pegawai baik teknis maupun non teknis agar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat berjalan dengan baik dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik.